

**POLITIK ANGGARAN DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA
DI KECAMATAN MARATUA KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Muhammad Rizky

NPP. 30.0971

Asdaf Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: 30.0971@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Rivan Jaelani, S.STP, M.Tr.I.P

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Maratua Island located in Maratua District has its underwater beauty which is an object of local and foreign tourists. People on this island on average work and work to make a living as fishermen, fish pond entrepreneurs, to owners of public places such as places to stay or hotels and also places to eat. Tourism development programs are the responsibility of the government, there are several works that must be completed by prioritizing tourism development can be achieved including improving transportation networks, hotels, and other visitor facilities. Of course, to complete the work, sources of funds are needed, both from the APBD or APBN and grant funds. **Objective:** The purpose of this study is to find out budget politics in the development of tourist attractions in Berau Regency. **Purpose:** The purpose of this study is to find out budget politics in the development of tourist attractions in Berau Regency. **Method:** This research method uses a qualitative approach with a descriptive type of research. The informants for this research consisted of members of the DPRD, the Culture and Tourism Office, the Maratua sub-district and the community. Data collection techniques are carried out by interviews, observations and documentation. **Result:** The results showed that the budget allocation for tourism development in Berau Regency was very minimal. The government can only allocate a limited amount of funds for the development of certain tourist areas. In the past 5 years, there are still many attractions that have not been well developed. In addition, there are several obstacles in tourism sector development policies, among others: interaction between the government and the private sector and the community, aspects of infrastructure development management, budget, aspects of marketing and promotion management and aspects of human resources. **Conclusion:** Budget politics in the development of tourist attractions in Maratua District, Berau Regency has been running as it should, both from the DPRD, and the Executive have a commitment to allocate a budget for the development of tourist attractions. However, there has been no participation from the community to take an active role in the budget planning process of tourist attractions.

Keywords: Local Original Revenue, Budget Politics, Retribution

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pulau Maratua yang terletak di Kecamatan Maratua memiliki keindahan bawah lautnya yang menjadi objek wisatawan lokal maupun mancanegara. Masyarakat dipulau ini rata-rata berprofesi dan berkerja untuk menyambung hidup sebagai nelayan, pengusaha tambak ikan, hingga pemilik tempat-tempat umum seperti tempat menginap atau hotel dan juga tempat makan. Program pengembangan wisata menjadi tanggung jawab pemerintah, terdapat beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan dengan memprioritaskan agar pengembangan wisata dapat tercapai diantaranya meningkatkan jaringan transportasi, hotel, dan fasilitas pengunjung lainnya. Tentunya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut diperlukan sumber dana yang berasal baik itu dari APBD atau pun APBN serta dana hibah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Politik anggaran dalam pengembangan objek wisata di Kabupaten Berau. **Metode:** Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya penelitian deskriptif. Informan penelitian ini terdiri pihak anggota DPRD, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Camat Maratua dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan alokasi anggaran untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Berau sangat minim. Pemerintah hanya dapat mengalokasikan dana dalam jumlah terbatas untuk pengembangan kawasan wisata tertentu saja. Dalam 5 tahun terakhir, masih banyak objek wisata yang belum dikembangkan dengan baik. Disamping itu, adanya beberapa hambatan dalam kebijakan pengembangan sektor pariwisata antara lain: interaksi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, aspek manajemen pembangunan sarana-prasarana, anggaran, aspek manajemen pemasaran dan promosi dan aspek SDM. **Kesimpulan:** Politik Anggaran dalam pengembangan objek wisata di kecamatan maratua kabupaten berau sudah berjalan sebagaimana mestinya, baik dari DPRD, maupun Eksekutif memiliki komitmen dalam mengalokasikan anggaran untuk pengembangan objek wisata. Akan tetapi belum adanya partisipasi dari masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam proses perencanaan anggaran objek wisata. **Kata kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Politik Anggaran, Retribusi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau yang disingkat APBD adalah produk pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan APBD adalah bentuk manajemen keuangan daerah dalam penempatan pos-pos sumber daya pada daerah secara optimal, serta sebagai alat ukur penilaian pembangunan pemerintahan dalam mengelola pembiayaan daerahnya. Maka dari itu ketika pemerintah mengeluarkan anggaran pembelanjaan untuk pembangunan haruslah diperuntukan pada kepentingan publik serta dapat dipertanggungjawabkan pengeluarannya secara transparan dan terbuka. Praktik politik anggaran dalam pengelolaan APBD saat ini menjadi isu yang krusial ditengah pelaksanaan otonomi daerah. Pasalnya dana tersebut kemudian yang akan menjadi solusi atau jalan keluar dalam mengatasi masalah strategis di daerah otonomnya.

Penyusunan APBD adalah sebuah proses yang membutuhkan waktu selama hampir satu tahun dari mulai proses musrenbang sampai penetapan APBD, malah beberapa kabupaten/kota karena proses politik yang masih belum menemukan "titik temu" antara pihak-pihak yang berperan harus menunggu penetapan APBD melebihi waktu yang telah ditentukan.

Kabupaten Berau memiliki beberapa potensi unggulan yang dapat di gali dan di temukan lagi secara mendalam seperti pertambangan batu bara, pertanian, ketahanan pangan, perikanan, serta yang paling terkenal potensinya adalah pariwisata. Jika wisata alam dan letak strategis Kabupaten Berau diperhitungkan, serta kekayaan dan penyambutan budaya masyarakatnya, industri pariwisata memiliki potensi besar untuk berkembang. Potensi pada sektor pariwisata menjadi daya tarik dan ciri khas di Kabupaten Berau yang jika pemerintah daerah lebih serius lagi dalam mengelolanya, tentu sektor pariwisata menjadi potensi unggulan Kabupaten Berau.

Pulau Maratua yang terletak di Kecamatan Maratua memiliki keindahan bawah lautnya yang menjadi objek wisatawan lokal maupun mancanegara. Masyarakat dipulau ini rata-rata berprofesi dan berkerja untuk menyambung hidup sebagai nelayan, pengusaha tambak ikan, hingga pemilik tempat-tempat umum seperti tempat menginap atau hotel dan juga tempat makan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Program pengembangan wisata menjadi tanggung jawab pemerintah, terdapat beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan dengan memprioritaskan agar pengembangan wisata dapat tercapai diantaranya meningkatkan jaringan transportasi, hotel, dan fasilitas pengunjung lainnya. Tentunya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut diperlukan sumber dana yang berasal baik itu dari APBD atau pun APBN serta dana hibah.

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) tidak dapat diimplementasikan sebagai bagian dari kebijakan nasional terhadap industri pariwisata, pemerintah daerah tetap mengembangkan sektor ini meskipun memiliki dana terbatas untuk melakukannya. Karena kekurangan ini, industri pariwisata dan bisnis terkait tidak berkembang seperti yang seharusnya. Namun, pemerintah Berau mampu mempertahankan tingkat pendapatan terkait pariwisatanya meskipun industri ini berkembang. Hal ini menjanjikan, Kabupaten Berau layak dicap sebagai destinasi wisata, dan pertumbuhan sektor ini, meskipun berskala sederhana, didukung oleh potensi tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi Pemkab Berau untuk melakukan penelitian tentang politik anggaran di bidang pengembangan objek wisata.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, hasil penelitian sebelumnya digunakan oleh peneliti sebagai referensi dan juga sebagai upaya peneliti dalam rangka menambah sumber pengetahuan terkait permasalahan yang diteliti. Terdapat lima penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian diantaranya: Penelitian Riyanto (2010) dengan judul penelitian “Politik Anggaran Provinsi Jawa Tengah : Analisis Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008-2010” yang berfokus pada realisasi APBD Jawa tengah 2008-2010; Penelitian Zunaidi (2021) dengan judul penelitian “Politik Anggaran Dan Pengelolaan Retribusi Pada Objek Wisata Di Aceh Selatan” yang membahas tentang bagaimana politik anggaran yang dilakukan pada objek wisata di aceh selatan; Penelitian Rahmi (2017) dengan judul penelitian “Politik Pengelolaan Objek Wisata Di Kabupaten Bintan Tahun 2013-2015” yang berfokus pada pengelolaan objek wisata di Kabupaten Bitan yang dilihat dari sudut pandang politik.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni politik anggaran dalam pengembangan objek wisata di Kecamatan Maratua. Penelitian ini juga dalam pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Key (2019) yang menyatakan bahwa dalam menetapkan program yang akan dimasukkan ke dalam anggaran tentunya seseorang harus memiliki kekuasaan, kewenangan, kepentingan, dan strategi.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Politik anggaran dalam pengembangan objek wisata di Kabupaten Berau.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif ini dapat memandu peneliti untuk menganalisis dan memahami masalah yang diteliti Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif ini, diharapkan dapat menghasilkan data dan fakta aktual dari lokasi fokus di mana penelitian dilakukan dihasilkan dan dikaitkan dengan teori yang sesuai yang terkait dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan dan menganalisis politik anggaran dan retribusi objek wisata Pulau Maratua .

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap beberapa orang informan yang terdiri dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran DPRD Kabupaten Berau, Sekertaris Daerah Kabupaten Berau, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Berau, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, Camat Maratua serta masyarakat sekitar Kecamatan Maratua. Adapun analisisnya menggunakan teori Key (2019) yang menyatakan bahwa dalam menetapkan program yang akan dimasukkan ke dalam anggaran tentunya seseorang harus memiliki kekuasaan, kewenangan, kepentingan, dan strategi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis politik anggaran dalam pengembangan objek wisata di Kecamatan Maratua menggunakan pendapat dari Key (2019) yang menyatakan bahwa dalam menetapkan program yang akan dimasukkan ke dalam anggaran tentunya seseorang harus memiliki kekuasaan, kewenangan, kepentingan, dan strategi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau

DPRD Kabupaten Berau bertugas mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang disusun bekerja sama dengan kepala daerah untuk memastikan anggaran yang akan ditetapkan dapat terlaksana dengan baik dan memiliki dasar hukum. Peran DPRD sebagai pengawas adalah mengevaluasi kepatuhan cabang eksekutif terhadap peraturan daerah (perda). Keberhasilan DPRD dalam politik anggaran dapat dilihat melalui:

1. Kepentingan

Kepentingan dalam hal ini mencakup kepentingan umum atau bersama yang mana berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau masyarakat, Istilah "kepentingan publik" mengacu pada konsep akademik yang memandu pekerjaan administrator publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota DPRD dapat disimpulkan bahwa dalam proses penganggaran khusus objek wisata tidak adanya kepentingan bahkan dalam upaya pembangunan daerah DPRD mendukung penuh objek wisata yang ada di Kecamatan Maratua agar menjadi prioritas dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Berau.

2. Kewenangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota DPRD diketahui bahwa DPRD Kabupaten Berau mempunyai kewenangan yang sama dengan DPRD di kabupaten/kota yang lainnya di Indonesia. Namun kewenangan lain yang dimiliki DPRD Kabupaten Berau adalah mendekatkan diri kepada konstituen dengan menjanjikan dana yang disediakan terutama untuk objek wisata.

3. Kekuasaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota DPRD diketahui bahwa DPRD Kabupaten menggunakan kekuasaannya dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat hal ini bisa dilihat dari wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu anggota DPRD Kabupaten Berau demi melestarikan potensi yang dimiliki.

4. Strategi

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota DPRD diketahui bahwa Setiap Organisasi Perangkat Daerah harus menjawab bagaimana ia membelanjakan uang yang diberikannya dan untuk pesanan lain yang dikeluarkannya. Menyusun rencana strategis dan rencana operasional tahunan, serta mengembangkan pola pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja kegiatan yang transparan, semuanya penting dalam rangka melaksanakan tugas yang bertanggung jawab.

3.2. Eksekutif

peran Eksekutif dalam menentukan porsi anggaran terutama anggaran untuk objek wisata dianalisis oleh peneliti melalui empat indikator sebagai berikut :

1. Kepentingan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Berau dapat disimpulkan bahwa indikator kepentingan, pemerintah sangat mendukung penuh upaya pengembangan objek wisata yang ada di Pulau Maratua demi kepentingan masyarakat dan kemajuan sektor wisata sebagai prioritas penyumbang PAD Kabupaten Berau.

2. Kewenangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Berau dapat disimpulkan bahwa lembaga eksekutif memiliki kewenangan dalam menentukan porsi anggaran terutama dalam hal pengembangan objek wisata di Kecamatan Maratua sebagaimana juga tercantum dalam peraturan perundang-undangan terutama peraturan daerah Kabupaten Berau.

3. Kekuasaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Berau dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Berau dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan pariwisata beserta Badan Pendapatan Daerah berkolaborasi dalam melaksanakan penarikan retribusi terhadap tempat-tempat yang berpotensi dapat meningkatkan PAD Kabupaten Berau, ini berkaitan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh badan eksekutif

4. Strategi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Berau dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah dalam upaya pengembangan objek wisata yang ada di Maratua menggunakan media brosur atau pamflet yang disebar ke hotel-hotel tempat wisatawan menginap untuk menarik minat wisatawan lainnya.

3.3. Masyarakat

Suku Bajau adalah suku nelayan yang merupakan kelompok etnis terbesar di Pulau Maratua. Orang-orang Bajau, dengan ritual dan tarian mereka yang penuh warna, membantu ekonomi Maratua berkembang. Pulau Maratua kini menjadi komponen dari kawasan Destinasi Wisata Nasional (DPN) Derawan sebagai hasil dari penggabungannya ke dalam gugusan Kepulauan Derawan. Karena Pulau Maratua merupakan bagian dari DPN, maka akan diberikan standar pembangunan yang lebih tinggi. Danau Kakaban, salah satu fitur alami Maratua, memiliki kemampuan untuk menarik wisatawan. Aset alam dan budaya Pulau Maratua menjadikannya lokasi utama untuk berbagai produk wisata khusus, termasuk yang melayani mereka yang memiliki minat tertentu (misalnya wisata bahari).

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dapat diketahui bahwa Partisipasi masyarakat Suku Bajau Maratua dalam melayani pengunjung menjadi salah satu cara di mana potensi kuliner pulau ini dapat mendorong industri pariwisatanya ke depan. Keterbukaan masyarakat terhadap gagasan

menyewakan rumah mereka sebagai akomodasi adalah indikator lain dari dampak positif industri pariwisata terhadap situasi keuangan mereka. Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk sepenuhnya mewujudkan potensi daerah tersebut untuk kepentingan masyarakat lokal.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Politik anggaran dalam pengembangan objek wisata di kecamatan maratua kabupaten berau sudah berjalan sebagaimana mestinya, baik dari DPRD, maupun Eksekutif memiliki komitmen dalam mengalokasikan anggaran untuk pengembangan objek wisata. Akan tetapi belum adanya partisipasi dari masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam proses perencanaan anggaran objek wisata. Temuan tersebut memiliki perbedaan dengan temuan pada penelitian yang dilakukan oleh Zunaidi (2021) yang dalam temuan penelitiannya menyatakan bahwa politik anggaran dan pengelolaan retribusi pada objek wisata di Aceh Selatan belum berjalan dengan baik.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan faktor penghambat dalam proses penganggaran objek wisata di kecamatan maratua kabupaten berau meliputi, strategi pemerintah dalam upaya pengembangan objek wisata, kesadaran masyarakat dalam partisipasi perencanaan anggaran objek wisata.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa politik anggaran dalam pengembangan objek wisata di kecamatan maratua kabupaten berau sudah berjalan sebagaimana mestinya, baik dari DPRD, maupun Eksekutif memiliki komitmen dalam mengalokasikan anggaran untuk pengembangan objek wisata. Akan tetapi belum adanya partisipasi dari masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam proses perencanaan anggaran objek wisata. Selain itu terdapat faktor penghambat dalam proses penganggaran objek wisata di kecamatan maratua kabupaten berau meliputi, strategi pemerintah dalam upaya pengembangan objek wisata, kesadaran masyarakat dalam partisipasi perencanaan anggaran objek wisata.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan politik anggaran dalam pengembangan objek wisata di Kecamatan Maratua untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Anggota DPRD Kabupaten Berau, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Berau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Key, V. O. (2019). *The Problem of Local Legislation in Marryland: A Report (Classic Reprint)*. London: Forgotten Books.

Rahmi, K. (2017). *Politik Pengelolaan Objek Wisata Di Kabupaten Bintang Tahun 2013-2015*. Pekanbaru: Universitas Riau.

Riyanto, A. (2010). *Politik Anggaran Provinsi Jawa Tengah: Analisis Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008-2010*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Zunaidi, R. (t.t.). *Politik Anggaran Dan Pengelolaan Retribusi Pada Objek Wisata Di Aceh Selatan*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.

